

KATA PENGANTAR

Sebagai Pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan sebagai Evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada Publik yang secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal.

Atas hal tersebut maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Lombok Timur pada awal tahun anggaran 2010 ini membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai Bahan pertanggung-jawaban kepada Publik atas tingkat kinerja yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2009 yang lalu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur, untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada Publik secara keseluruhan terhadap Program serta Kegiatan yang sudah dilaksanakan berikut permasalahannya, semoga bermanfaat bagi kemajuan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak, demi penyempurnaan penyusunan laporan ini di tahun-tahun mendatang.

Selong, 9 Januari 2010.

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

K e p a l a ,

H. HARYADI DJOEWAYNI, SH. MH.

NIP. 19880321 198810 1 001.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi Informasi yang semakin pesat, Penyelenggaraan Transportasi Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Lombok Timur dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi komunikasi dan informasi dengan sebaik baiknya. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur selaku leading sektor penggerak dibidang ini terus berusaha dan berupaya melakukan terobosan untuk lebih meningkatkan layanan transportasi dan Informasi kepada masyarakat melalui sarana parasarana dan media yang dimiliki. Keberhasilan atau kegagalan dalam memberikan pelayanan dimaksud dapat digambarkan dalam bentuk laporan hasil pencapaian pengukuran kinerja kebijaksanaan dan program sebagai berikut.

Sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam tahun 2009 adalah untuk meningkatkan aktifitas angkutan pelayaran antar pulau serta terwujudnya manajemen angkutan umum yang aman tertib dan lancar dibarengi komunikasi dan informasi yang baik dengan indikator sasaran jumlah terminal angkutan darat, sarana prasarana serta fasilitas LLAJ yang terpelihara, jenis pembinaan dan informasi yang dikomunikasikan dengan baik.

Guna menjalankan Tugas dan Fungsinya didalam pengelolaan sarana perhubungan, transportasi, jaringan informasi dan komunikasi pada hakekatnya menumbuhkan motivasi masyarakat, Lembaga lembaga Institusi masyarakat serta memberikan pelayanan berupa penjelasan berbagai Program Pemerintah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mencapai hasil pembangunan yang telah ditetapkan.

Tantangan kedepan yang kita hadapi semakin berat dan kompleks, disatu sisi dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan yang terwujud di dalam pelayanan jasa transportasi darat, laut, penyajian informasi yang mutakhir dan akurat, namun disisi lain kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana harus mendapat perhatian yang seimbang.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, kegiatan pelayanan jasa transportasi, informasi dan komunikasi dilakukan melalui berbagai Program antara lain :

1. Pelayanan Administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan disiplin aparatur;

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
7. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
8. Peningkatan pelayanan angkutan;
9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
10. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
11. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
12. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
13. Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
14. Kerjasama Informasi dengan Mass Media, disamping program rutin lainnya.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam tahun anggaran 2009 sebanyak 50 kegiatan baik pada Urusan Wajib Perhubungan, Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pilihan lainnya dengan prosentase capaian kinerja melalui Pengukuran Kinerja rata-rata capaian adalah sebesar 89,10 %. Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, besaran anggaran yang diperoleh dalam Tahun anggaran 2009 untuk sektor Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai PP 41 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009 adalah sebesar :

I. Anggaran Belanja Tidak Langsung	
(Belanja Aparatur)	: Rp. 2.616.019.403,-
II. Anggaran Belanja Langsung	
(Belanja Publik)	: <u>Rp. 3.271.603.496,-</u>
Jumlah	: Rp. 5.887.622.899,-

Dari jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Aparatur) sebesar Rp. 2.616.019.403,- yang telah terpakai sebesar Rp. 2.576.543.200,- (98,49 %) dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp. 39.476.203,- (1,51 %), sedangkan jumlah Anggaran Belanja Langsung (Anggaran Publik) sebesar Rp. 3.271.603.496,- yang telah terpakai sebesar Rp. 2.915.586.781,- (89,12 %) dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp. 356.016.715,- (10,88 %) telah dilaksanakan sesuai rencana Program/kegiatan dan berjalan baik dengan pencapaian dari 14 Sasaran

dengan 50 Indikator Sasaran kegiatan yang ditetapkan telah mencapai fisik sebesar 96,03 %.

Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus diupayakan peningkatannya dan sedapat mungkin dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang dengan memprioritaskan alokasi dana dan efisiensi melalui peningkatan SDM serta peningkatan sarana, prasarana transportasi, komunikasi dan informatika serta penyelesaian sedini mungkin terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan.

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

C. Mandat yang diterima

D. Struktur Organisasi

E. Sumber Daya Manusia

F. Sarana dan Prasarana Pendukung

BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategik

B. Rencana Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Evaluasi Kinerja

BAB IV PENUTUP

Lampiran – lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 yang ditindak lanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkannya. Untuk maksud tersebut, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur menyusun LAKIP tahun 2009 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan per Undang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2009.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur tahun 2009 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas tahun 2003 - 2008 sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Kabupaten yang dalam pelaksanaannya masih mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat yang sangat penting, yaitu sebagai Dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja. LAKIP ini merupakan Laporan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 th 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2009;
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lombok Timur tahun 2009.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Sektor transportasi komunikasi dan informasi merupakan bagian integral dari kegiatan dan distribusi, dengan demikian mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pembangunan Nasional, baik sebagai penunjang maupun perangsang pertumbuhan ekonomi dan berbagai sektor pembangunan lainnya, sedangkan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dimaksudkan dapat menciptakan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bidang komunikasi informasi serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah.

Peranan sektor transportasi komunikasi dan informasi yang begitu penting ini memerlukan dukungan kelengkapan data dan informasi dalam proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan program-program pembangunan.

C. Mandat yang diterima

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 tahun 2008, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, pelaksanaan program operasional perhubungan darat dan laut, pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan data komunikasi dan informatika;
- d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- f. Pelaksana kegiatan penatausahaan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur maka struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
 - Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbag Program dan Pelaporan
 - b. Subbag Keuangan
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Perhubungan Darat
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional
 - b. Seksi Angkutan Jalan dan Penyeberangan
 - c. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana
- 4. Bidang Perhubungan Laut
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan laut
 - b. Seksi Kepelabuhanan
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran
- 5. Bidang Sarana Komunikasi dan Informatika
 - a. Seksi Sarana komunikasi dan informatika
 - b. Seksi Teknologi dan pengelolaan data elektronik
 - c. Seksi Pos, telekomunikasi dan aplikasi telematika
- 6. Bidang Media dan Pelayanan Informasi Publik
 - a. Seksi Media informasi dan komunikasi
 - b. Seksi Info mobil, film dan bahan informasi

- c. Seksi Peliputan, publikasi dokumentasi dan penyiaran.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung).

E. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 69 orang PNS dan 17 orang tenaga Non PNS/ Honda dan 47 orang tenaga kegiatan dengan perincian sbb.

Tenaga PNS : 69 orang

PENDIDIKAN		GOLONGAN	
S2	= 2 orang	IV/ b	= 6 orang
S1	= 22 orang	IV/ a	= 1 orang
D3	= 7 orang	III/ d	= 13 orang
SLTA	= 29 orang	III/ c	= 7 orang
SLTP	= 6 orang	III/ b	= 10 orang
SD	= 3 orang	III/ a	= 4 orang
		II/ d	= 4 orang
		II/ c	= 8 orang
		II/ b	= 1 orang
		II/ a	= 13 orang
		I/c	= 1 orang
		I/ a	= 1 orang

Tenaga Non PNS/ Honda : 17 orang

PENDIDIKAN		GOLONGAN	
S1	= 3 orang		--
SLTA	= 12 orang		--
SLTP	= 1 orang		--
SD	= 1 orang		--

Tenaga Kegiatan : 47 orang

PENDIDIKAN		GOLONGAN	
D1	= 3 orang		--
SLTA	= 41 orang		--
SLTP	= 1 orang		--
SD	= 2 orang		--

F. Sarana dan Prasarana

Sarana

No.	Jenis Sarana	Luas		Status	Ket.
		Tanah	Bangunan		
1.	Tanah/Gedung Kantor	1.500 m ²	10 x 21 m ²	Hak pakai	APBD II Kab.Lotim
2.	Tanah terminal pancor	2.836 m ²	-	Sda	Sda
3.	Tanah terminal Lb.Haji	1.600 m ²	-	Sda	Sda
4.	Tanah terminal Lb.Lombok	1.544 m ²	-	Sda	Sda
5.	Tanah terminal keruak	1.600 m ²	-	Sda	Sda
6.	Tanah terminal sembalun	4.000 m ²	-	Sda	Sda
7.	Tanah Gdg Kantor Tanjung	750 m ²	200 m ²	Hibah	Dishub Prop. NTB
8.	Tanah Pelabuhan Tj.Luar	250.000 m ²	-	sda	Hibah Dishub
9.	Gedung Kantor	-	100 m ²	sda	sda

Prasarana

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan roda 4		Roda 4 DR. 75 K sedang dalam
	- Kijang	5 buah	Proses pelelangan
	- Suzuki Station	2 buah	
2.	Kendaraan roda 2	27 buah	
3.	Meja Komputer	15 buah	
4.	Komputer	16 buah	
5.	Werles	2 buah	
6.	Sound system	2 unit	
7.	Werles stand	1 unit	
8.	Mesin tik	5 buah	
9.	Filling kabinet	5 buah	
10.	Lemari kayu	14 buah	
11.	Rak kayu	5 buah	
12.	Lemari besi	3 buah	
13.	Meja besi	3 buah	
14.	Meja biro	4 buah	
15.	Meja kerja	65 buah	
16.	Kursi kerja	65 buah	
17.	Kursi tamu	4 stel	
18.	Kursi putar	4 buah	
19.	Bangku tunggu	2 buah	
20.	Meja rapat/ kursi	45 buah	
21.	AC.	2 unit	
22.	Kipas angin	4 buah	
23.	Cash Box	3 buah	
24.	Rak kaca	4 buah	

BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK

Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Dalam Rencana Strategik hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang berorientasi pada cita-cita masa depan yang lebih baik.

1. VISI DAN MISI

1.1. RUMUSAN VISI

Rumusan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur merupakan Visi Institusi yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya. Rumusan Visi Institusi ini disusun dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Lombok Timur.

Secara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten, aktivitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dimasa datang yang berstandar pada Visi Kabupaten Lombok Timur jangka panjang yaitu " Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan dalam Lindungan Allah SWT." Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut merupakan kewajiban seluruh sektor pembangunan dan juga seluruh potensi yang ada, khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dalam konteks ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan di

Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi dan RPJM Kabupaten Lombok Timur tahun 2009-2013, maka Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut : **"Terwujudnya transportasi darat, laut dan sistem pelayanan informasi publik yang handal dan berdaya saing"** . Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Terciptanya pelayanan jasa transportasi dan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, aman, nyaman dan tepat waktu serta dapat menjangkau wilayah potensial sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah.
2. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi darat, laut dan peningkatan pelayanan informasi publik;
3. Memberikan arah pembangunan dan pengembangan dalam penyelenggaraan transportasi darat dan laut serta Terselenggaranya pelayanan informasi dengan pemanfaatan media yang dimiliki;
4. Penyelenggaraan transportasi komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien yaitu adanya keseimbangan antara kemampuan pembangunan penyedia infrastruktur transportasi, informasi, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi telematika, pengembangan sarana komunikasi serta peningkatan peranan informasi publik.

1.2. RUMUSAN MISI

Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur dirumuskan sebagai upaya untuk mencapai Visi. Rumusan Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai fokus aktifitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur yang meliputi aspek pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Rumusan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi darat, laut dan pelayanan informasi;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Transportasi dan Informatika.
3. Meningkatkan jaringan pelayanan jasa transportasi, Komunikasi dan Informatika.
4. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur jaringan teknologi informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, laut dan peningkatan pemerataan penyebaran informasi publik kepada masyarakat Lombok Timur.
6. Meningkatkan kualitas SDM dibidang Transportasi, Komunikasi dan Informatika.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan

Dalam kaitannya dengan Rencana Strategis, tujuan adalah hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dalam 1 tahun dan harus mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) dan ditetapkan setelah penetapan visi dan misi melalui analisa lingkungan, baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Penetapan Tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi dan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dikemukakan diatas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Terselenggaranya pelayanan angkutan yang selamat, lancar dan tertib operasional transportasi, penyebaran informasi.
2. Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi dan informatika

3. Tersedianya jaringan pelayanan transportasi dan informatika sampai keseluruhan wilayah terutama sentra-sentra produksi.
4. Tersedianya kualitas sumberdaya manusia yang profesional dan mampu menguasai perkembangan teknologi informatika.
5. Terwujudnya iklim usaha jasa transportasi dan Komunikasi yang lebih kondusif dengan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan.
6. Meningkatkan disiplin dan ketertiban usaha pengelola jasa transportasi;
7. Meningkatkan produktifitas, keamanan dan kelancaran tugas;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran;
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Melalui Media Cetak, Tradisional, Tatap Muka, Media Massa serta Media Luar Ruang dan Teknologi Modern.

2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dan lebih spesifik dari tujuan, oleh karena itu sasaran harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergi dan berkesinambungan/ berkelanjutan.

Sasaran harus dapat diukur dan tingkat capaiannya dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran. Sasaran tahunan tercantum didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sedangkan sasaran lima tahun tercantum didalam Rencana Strategik (RS).

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Terjaga dan tersedianya fasilitas transportasi darat dan laut yang memadai;
2. Terbinanya manajemen angkutan umum (darat dan laut) yang aman dan tertib;
3. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan;
4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran;
5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi melalui Media Cetak, Tradisional, Tatap Muka dan Media Massa;

6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Melalui Media Luar Ruang;
7. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Melalui Teknologi Modern.

3. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

3.1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, acuan atau petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan. Kebijakan dapat dievaluasi/ditinjau kembali sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Kebijakan yang menjadi acuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur adalah :

- 1). Memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat.
- 2). Peningkatan pelayanan jasa transportasi darat dan laut.
- 3). Peningkatan infrastruktur transportasi darat dan laut.
- 4). Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi.
- 5). Peningkatan infrastruktur komunikasi dan informasi

3.2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, saling terkait dan sinerjik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Adapun Program Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur adalah sbb. :

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program peningkatan sarana & prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

7. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelabuhan;
8. Program peningkatan pelayanan angkutan;
9. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
10. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
11. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
12. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa;
13. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi;
14. Program Kerja sama Informasi dengan Mass Media.

3.3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran yaitu sbb. :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan;
12. Penyediaan makanan dan minuman;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
15. Penyediaan jasa pegawai non PNS.
16. Pembangunan Gedung Kantor;
17. Pengadaan Meubelair;
18. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
19. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
20. Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair;

21. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya;
22. Pendidikan dan pelatihan formal;
23. Penyusunan laporan capaian kinerja;
24. Peningkatan dan Intensifikasi Retribusi daerah;
25. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan;
26. Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelabuhan;
27. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya ;
28. Penciptaan keamanan dan kenyamanan di lingkungan terminal;
29. Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama;
30. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak angkutan umum teladan;
31. Operasi gabungan, penertiban hari besar keagamaan, patroli keliling dan pasar tumpah;
32. Pengujian dan Sertifikasi Kapal;
33. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi pedesaan di daerah tertinggal;
34. Pembangunan dan penataan tempat parkir;
35. Pengadaan fasilitas keselamatan angkutan jalan;
36. Pengadaan Alat pengujian kendaraan bermotor;
37. Pengujian dan penertiban kendaraan tidak bermotor (KTB);
38. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi melalui penyelenggaraan layanan jasa internet;
39. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi melalui aplikasi dan telematika melalui pengolahan dan pemeliharaan website;
40. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi melalui pemutakhiran data sarana informasi;
41. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika pada Dishubkominfo;
42. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui pembutan Leaflet;
43. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Spanduk;
44. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui peliputan dan pendokumentasian kegiatan pembangunan;

45. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM);
46. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui siaran 5 jam RRI suara Gumi Selaparang;
47. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok kesenian tradisional;
48. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui penertiban Ijin bagi Pengusaha Rental VCD, PS, TV.kabel, Radio dan Film;
49. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui siaran keliling mobil unit;
50. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui pemutaran film keliling;

B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja (Renja) merupakan produk dari " Perencanaan Kinerja ", sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun.

Rencana Kinerja disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang :

- 1). Sasaran tahunan beserta indikator kinerja sasaran tahunan dan target capaiannya;
- 2). Program tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan;
- 3). Kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

1. Sasaran Tahunan

Sasaran tahunan adalah bagian dari sasaran 5 tahun dalam Rencana yang akan diwujudkan secara bertahap pada tahun tertentu. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran.

Dengan target indikator kinerja dalam bentuk jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan 14 Program yang akan dicapai dalam tahun 2008 dan mencakup 50 sasaran kegiatan.

Sasaran tahun 2009 beserta indikator kinerja dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat didalam format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) lampiran 2.

2. Program Tahunan

Program tahunan (tahun 2008) merupakan bagian dari program yang tercantum didalam Renstra yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran tahunan. Bila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program dan kegiatan merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Program tahun 2008 dapat dilihat dalam Format Rencana Strategis (RS) lampiran 1.

3. Kegiatan Tahunan

Kegiatan tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program. Kegiatan didefinisikan sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.

Sama halnya dengan sasaran, kegiatan juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat dinilai keberhasilannya, diukur secara objektif dan akurat.

Perumusan indikator kinerja kegiatan harus relevan, terkait dan dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisir. Indikator kinerja tersebut harus memenuhi kriteria : spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai.

Indikator kegiatan dikategorikan kedalam kelompok indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil). Input Adalah semua sumberdaya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan; yang antara lain berupa dana, peralatan, metode dan bahan/material bahkan Sumber Daya Manusia/SDM.

Output adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya suatu bangunan atau barang yang dibangun/dibeli, kali kegiatan suatu acara/aktifitas yang dilaksanakan, jumlah orang/lembaga yang diberi penyuluhan/bimbingan/ pembinaan. **Outcome** merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas perilaku, atau berfungsinya bangunan atau barang yang dibeli dsb nya. **Benefit** adalah manfaat yang diperoleh dari adanya outcome, yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sedangkan **impact** adalah pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang ditimbulkan benefit.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam tahun anggaran 2008 adalah 68 kegiatan yang secara rinci dapat dilihat pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) lampiran 3.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Lombok Timur tahun 2009 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2009 yang telah ditetapkan sebelumnya sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2009.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur tahun 2009 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan tahun anggaran 2009 dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan, keluaran, dan hasil. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Lampiran III. Sedangkan pengukuran sasaran

strategis dituangkan dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada Lampiran II.

B. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara Internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang

- 1) Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan
- 2) Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Namun perbandingan dengan pemerintah daerah lain ataupun dengan standar nasional maupun internasional, belum dapat dilakukan, karena keterbatasan data yang dimiliki.

1) Efisiensi kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *masukan* yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan *keluaran* yang sama, atau *masukan* yang sama dapat menghasilkan *keluaran* yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *masukan* dan *keluaran* dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian *keluaran* dengan capaian *masukan*. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah angka capaian efisiensi menurut rencana/target, yaitu apabila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien.

- ✓ Selama tahun 2009, dari sejumlah 50 kegiatan yang dilakukan evaluasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur telah berhasil melaksanakan sebanyak 49 kegiatan (96,03 %) dengan efisien. Untuk kegiatan-kegiatan yang kurang efisien ini akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk kelangsungan kegiatan pada tahun berikutnya.

2) Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai "tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan". Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *hasil* dari kegiatan tersebut.

Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

a) Efektivitas individual kegiatan;

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *hasil* yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

b) Efektivitas terkait sasaran.

Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh gambaran bahwa, dari 50 kegiatan tahun 2009 yang dilakukan evaluasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur telah berhasil melaksanakan sebanyak 49 (96,03 %) kegiatan dengan efektif .

2.1) Kegiatan yang efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata 80 - 100%. Selama tahun 2009, kegiatan-kegiatan yang dikategorikan efektif adalah sebanyak 49 kegiatan. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah, tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan serta tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

2.2) Kegiatan yang Kurang Efektif

Kegiatan dinyatakan kurang efektif apabila capaian rata-rata indikator *hasil* nya di bawah 80 - 100%. Selama tahun 2009, tidak terdapat (6 %) kegiatan yang termasuk dalam kategori ini. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh adanya keterlambatan realisasi dana sejak awal dimulainya kegiatan, disamping itu sempitnya waktu antara turunnya dana dengan tenggat waktu pengerjaan SPJ sehingga beberapa ada yang tidak sempat di SPJkan namun sudah dilaksanakan pekerjaan fisiknya sebagaimana wujud pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya. Di samping itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur akan melakukan langkah-langkah peyempurnaan, antara lain berupa penyempurnaan indikator kinerja, validitas data kinerja, peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring.

2.3) Kegiatan yang belum dapat ditentukan/ diukur efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja *hasil* nya. Selama tahun 2009, Hambatan dalam penentuan indikator kinerja *hasil* adalah kemampuan pengelola kegiatan yang masih kurang dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku. Pada tahun berikutnya, akan diarahkan agar pengelola kegiatan mampu merumuskan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakannya.

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur tahun 2009 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar

dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form PPS) dan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form PKK).

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2009, dikelompokkan sesuai rumusan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003-2008. Dalam analisis pencapaian kinerja diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang. Analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2009.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Sektor transportasi merupakan bagian integral dari kegiatan dan distribusi sehingga mempunyai peran penting dalam Pembangunan Nasional, baik sebagai penunjang maupun sebagai perangsang pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor pembangunan. Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah.

Di sisi lain transportasi juga berkembang sebagai industri jasa yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelancaran sistem transportasi atau pergerakan orang/barang dipengaruhi oleh berbagai macam sistem yakni : sistem kegiatan, jaringan, pergerakan, maupun kelembagaan. Selain keempat sistem tersebut permasalahan transportasi/perhubungan juga dipengaruhi oleh disiplin dan profesionalisme, perilaku budaya penduduk, mulai dari pengguna/pengendara kendaraan umum/pribadi, pejalan kaki maupun pengguna dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi lainnya. Pengembangan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur didasarkan pada potensi daerah dan kemampuan masyarakat, dengan harapan

akan menghasilkan suatu pembangunan yang lestari dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan komunikasi dan informasi, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menerapkan kebijakan dibidang perhubungan komunikasi dan informasi meliputi :

- 1). Memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat.
- 2). Peningkatan pelayanan jasa transportasi darat dan laut.
- 3). Peningkatan infrastruktur transportasi darat dan laut.
- 4). Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi.
- 5). Peningkatan infrastruktur komunikasi dan informasi

Sedangkan program yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja adalah : Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; Program peningkatan pelayanan angkutan ; Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; Program peningkatan kelaikan pengopearasian kendaraan bermotor; Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa; Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi; Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang komunikasi dan informasi; dan Program kerja sama informasi dengan mass media.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja dan keberhasilan program telah ditetapkan beberapa indikator yang target beserta realisasinya dapat dilihat pada lampiran PPK dan PPS.

Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan dibidang transportasi (perhubungan) komunikasi dan informasi, antara lain :

- a) Masih dijumpai adanya pelanggaran Jalur Trayek Angkutan Umum;
- b) Masih dijumpai pelanggaran oleh para sopir karena rendahnya pendidikan dan kesadaran berlalu lintas;
- c) Masih kurang tertibnya kendaraan tradisional roda 2 yaitu Becak/cidomo;

- d) Belum optimalnya upaya Sosialisasi Perda tentang transportasi, keselamatan lalu lintas dan pemanfaatan rambu – rambu lalu lintas;
- e) Masih terbatasnya fasilitas keselamatan yang tersedia.

Beberapa langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a) Mengadakan operasi dan penertiban terpadu/razia pada beberapa titik kegiatan. Dengan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian. Intensifikasi retribusi izin trayek dan pengujian kendaraan angkutan umum dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta melakukan penyuluhan di jalan dan sosialisasi kepada sopir dan pengguna jalan umum.
- b) Mendata ulang jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (Becak/cidomo)
- c) Menyusun data kebutuhan fasilitas perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- d) Menyusun master plan pengembangan Sarana Komunikasi dan Informasi;
- e) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan.

Kinerja tersebut diatas dapat dicapai melalui pelaksanaan 14 (empat belas) program dan 50 (lima puluh) kegiatan yang meliputi urusan wajib perhubungan, urusan wajib komunikasi dan informasi dengan jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.887.622.899,- yang dialokasikan untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.616.019.403,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.271.603.946,-

Secara rinci Alokasi Anggaran dan Realisasi per kegiatan pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	1.499.500	99.97
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.367.996	18.199.806	64.16
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ Operasional	6.000.000	5.994.000	99.90
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	86.616.000	64.570.000	74.55
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000	4.000.000	100

Uraian Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000	2.190.000	54.75
7.	Penyediaan alat-alat tulis kantor	14.000.000	14.000.000	100
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000	5.584.800	74.46
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.012.000	7.473.500	93.28
10.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.250.000	10.250.000	77.36
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	7.500.000	5.693.000	75.91
12.	Penyediaan bahan makanan dan minuman	15.125.000	8.527.500	56.38
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45.026.000	40.076.000	89.01
14.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	13.540.000	6.655.000	49.15
15.	Penyediaan jasa tenaga kerja Non PNS	80.100.000	80.100.000	100
16.	Pembangunan gedung kantor	78.546.000	66.851.000	85.11
17.	Pengadaan Meubelair	5.000.000	4.600.000	92.00
18.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	14.839.000	98.93
19.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/ operasional	137.300.000	107.150.000	78.04
20.	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	1.500.000	1.500.000	100
21.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	20.250.000	20.081.250	99.17
22.	Pendidikan dan pelatihan formal	23.280.000	11.150.000	47.90
23.	Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja	5.000.000	5.000.000	100.00
24.	Peningkatan dan Intensifikasi Retribusi daerah	50.000.000	44.248.500	88.50
25.	Perencanaan pembangunan prasarana fasilitas pelabuhan	47.850.000	47.300.000	98.85
26.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana & fasilitas pelabuhan	28.000.000	21.417.500	76.49
27.	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	143.260.000	139.710.000	97.52
28.	Penciptaan keamanan dan kenyamanan di lingkungan terminal	101.940.000	100.565.000	98.65
29.	Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat	8.520.000	7.300.000	85.68
30.	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.	20.000.000	20.000.000	100
31.	Operasi gabungan, penertiban hari besar keagamaan, patroli keliling dan pasar tumpah	16.100.000	4.300.000	26.71
32.	Pengujian dan sertifikasi kapal	20.000.000	17.275.000	86.38
33.	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi pedesaan di daerah tertinggal	1.523.500.000	1.417.750.000	93.06
34.	Pebangunan dan penataan tempat parkir	37.575.000	37.100.000	98.74
35.	Pengadaan fasilitas keselamatan Angkutan jalan	178.370.000	176.269.180	98.82
36.	Pengujian Kendaraan bermotor	59.225.000	58.382.250	98.58
37.	Pengujian kendaraan tidak bermotor (KTB)	37.500.000	35.140.000	93.71

Uraian Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
38.	Pembinaan dan pengembangan jaringan kominfo melalui operasional penyelenggaraan layanan jasa internet	63.260.000	57.989.517	91.67
39.	Pengkajian dan pengembangan system informasi melalui (pengelolaan dan pemeliharaan website)	169.260.000	110.642.500	65.37
40.	Pengkajian dan pengembangan system informasi melalui pemutakhiran data sarana informasi	9.000.000	2.935.000	32.61
41.	Pelatihan SDM bidang kominfo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	7.400.000	-	-
42.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Pembuatan Leaflet	7.200.000	6.040.000	83.89
43.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Spanduk	9.000.000	8.000.000	88.89
44.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui liputan dan pendokumentasian keg. Pembangunan	18.000.000	12.400.000	68.89
45.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	15.000.000	15.000.000	100.00
46.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan 5 jam siaran RRI suara gumi selaparang	25.000.000	19.982.978	79.93
47.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui pagelaran kesenian tradisional	10.377.500	10.375.000	99.98
48.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui penertiban dan pengawasan Ijin pengusaha rental VCD, PS, TV.Kabel, Radio dan film	15.000.000	14.027.000	93.51
49.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui Siaran keliling mobil unit	12.293.000	12.166.000	98.97
50.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui Pemutaran film keliling	18.560.000	13.287.000	71.59
J u m l a h		3.271.603.496	2.915.586.781	89.12

BAB IV

P E N U T U P

Demikian keadaan sebenarnya yang dapat kami paparkan dalam LAKIP ini sebagai Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.

A. Kesimpulan

1. Kegiatan fisik dan nonfisik yang tertuang dalam Rencana Kinerja secara umum telah terlaksana dengan baik dan lancar mencapai hasil 96,03 %.
2. Dari segi jumlah anggaran yang tersedia untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.887.622.899,- terpakai sebesar Rp. 5.492.129.981,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 395.492.918,- dengan rincian sbb : 1). Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Hubkominfo Rp. 7.400.000,- 2). Dan beberapa kegiatan lainnya yang tidak dapat diselesaikan seratus persen, dikarenakan adanya keterlambatan realisasi dana dan kenaikan harga beberapa jenis bahan/material, maka pekerjaan tersebut tidak seluruhnya dapat dilaksanakan, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 395.492.918,- tidak dapat direalisasikan penggunaan dananya dan selebihnya sisa kas dalam bentuk tunai telah dikembalikan oleh Bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ke Kas Daerah Kabupaten Lombok Timur.

B. Saran

Bahwa guna mendukung fungsi dan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika turut berkiprah dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur ini, agar lebih berfungsi secara maksimal sebagai Lembaga Daerah yang Otonom serta kiprah dan citranya lebih berkembang, maka untuk tahun-tahun berikutnya kiranya anggaran yang dikelola dapat ditingkatkan.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009 ini kami buat dengan harapan adanya koreksi guna sempurnanya pembuatan LAKIP pada tahun-tahun berikutnya.

Selong, Januari 2010.

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala,

H. HARYADI DJOEWAYNI, SH. MH.
NIP. 19610321 198810 1 001.



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(DISHUBKOMINFO)**

Jl. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid No.31 Pancor ☎ (0376) 21176, Kode Pos : 83612.

Selong, 25 Muharam 1431 H.
09 Maret 2010 M.

Nomor : 045.2/ / DISHUBKOMINFO/ 2010.
Lampiran : 3 (tiga) expl
Perihal : LAKIP Tahun 2009.

K e p a d a

Yth : BUPATI LOMBOK TIMUR
Cq. Kepala BAPPEDA
Kab. Lombok Timur
di
S e l o n g .

*Bismilahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program untuk Tahun Anggaran 2009, disertai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Lombok Timur.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

*Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb*

**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

K e p a l a ,

H. HARYADI DJOEWAYNI, SH. MH.
NIP. 19610321 198810 1 001.